

Oleh:

**Lydia Ivana Kumajas<sup>1</sup>**  
**David Paul Elia Saerang<sup>2</sup>**  
**Joubert Baren Maramis<sup>3</sup>**  
**Lucky Otto Herman Dotulong<sup>4</sup>**  
**Djurwati Soepeno<sup>5</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Doktor Ilmu Manajemen  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup>lydia.kumajas@unima.ac.id

<sup>2</sup>d\_saerang@lycos.com

<sup>3</sup>joubertmaramis@unsrat.ac.id

<sup>4</sup>luckydotulong@unsrat.ac.id

<sup>5</sup>watisoepeno@unsrat.ac.id

**Abstrak:** *Sustainable Finance* bertujuan menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan serta tata kelola perusahaan. Merupakan konsep yang disepakati secara global dan regional termasuk ASEAN. Sebagai konsep keuangan baru, terdapat kendala dalam penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan kontradiksi penerapan *sustainable finance* di wilayah ASEAN khususnya anggota ASEAN Exchange, melalui studi literatur pada penelitian sebelumnya. Menggunakan software publish or perish, berdasarkan 29 artikel diperoleh hasil terdapat 8 hambatan penerapan keuangan berkelanjutan yaitu ; permasalahan inklusi keuangan, permasalahan aturan dan regulasi, kurangnya sosialisasi keuangan berkelanjutan dan kesamaan persepsi antar pihak terkait, pengungkapan laporan berkelanjutan, permasalahan kinerja keuangan, kesulitan menyeimbangkan aspek ekonomi sosial dan lingkungan, permasalahan prosedur pemberian kredit, dan intervensi teknologi. Selain hambatan juga terdapat dampak positif bagi perusahaan antara lain, keuangan berkelanjutan memiliki prinsip yang sama dengan keuangan syariah, meningkatkan ketahanan perusahaan dimasa depan, meningkatkan pangsa pasar produk dan jasa *green financing*, perusahaan mendapatkan akses *green financing*, meningkatkan reputasi, serta pengurangan biaya melalui efisiensi. Makna dari penelitian ini adalah dibutuhkan pergeseran paradigma ekonomi dan bisnis dari orientasi keuntungan menuju pada orientasi keseimbangan ekonomi sosial dan lingkungan.

**Kata Kunci:** *Sustainable finance*, ASEAN

**Abstract:** *Sustainable Finance* aims to create economic, social and environmental value as well as corporate governance. It is a globally and regionally agreed concept, including ASEAN. As a new financial concept, there are obstacles in its implementation. The purpose of this study is to find out the contradictions in the application of *sustainable finance* in the ASEAN region, especially members of the ASEAN Exchange, through a study of previous research literature. Using publish or perish software, based on 29 articles, the results obtained are 8 obstacles to the implementation of *sustainable finance*, namely; financial inclusion problems, rules and regulations problems, lack of socialization of *sustainable finance* and common perception among related parties, disclosure of sustainability reports, financial performance problems, difficulties in balancing social and environmental economic aspects, problems in lending procedures, and technological interventions. In addition to the obstacles, there are also positive impacts for the company, among others, *sustainable finance* has the same principles as Islamic finance, increasing the company's resilience in the future, increasing the market share of *green financing* products and services, companies getting access to *green financing*, improving reputation, and reducing costs through efficiency. The meaning of this research is that paradigm shift in economics and business from a profit orientation to towards a balance of economics, social and environment.

**Keywords:** *Sustainable finance*, ASEAN

## Latar Belakang

Transisi ekonomi global menuju pada ekonomi hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak merusak lingkungan hidup. Keberhasilan suatu negara dalam menjalankan ekonomi hijau salah satunya dapat dilihat dari skor atau peringkat *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut membutuhkan kerjasama pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Aust *et.al* (2020) dalam penelitiannya ditemukan adanya kontribusi investor terhadap pencapaian SDGs.

Kontribusi sektor swasta dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menjalankan operasional perusahaan dengan memperhatikan *environmental, social and governance* (ESG). Aktivitas perusahaan dengan memperhatikan keselarasan *people, planet, profit* (*Triple Bottom Line*) dalam perkembangannya membutuhkan pendanaan. Adapun investasi pada perusahaan yang memperhatikan keberlanjutan berhadapan dengan asumsi bahwa keberlanjutan bertentangan dengan teori portofolio moderen, dimana perusahaan yang menerapkan keberlanjutan dalam aktivitasnya membutuhkan biaya yang lebih tinggi sehingga mengurangi *return* bagi pemilik saham (Langbein dan Posner, 1980). Selain itu Zeidan (2022) menemukan adanya pandangan negative terkait investasi pada perusahaan yang menjalankan prinsip ESG.

Kuangan Berkelanjutan berkelanjutan berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim, sehingga mengalihkan tujuan dari memaksimalkan keuntungan menjadi penciptaan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan serta tata kelolah perusahaan. Kegiatan perusahaan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keberlanjutan (*Sustainable Report*). Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) suatu negara berkaitan dengan aliran dana yang diterima oleh sektor swasta untuk peningkatan operasional perusahaan berbasis ESG, tanpa adanya dukungan pendanaan maka upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan akan sulit dicapai. Menyadari hal tersebut, di Indonesia pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan NOMOR 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, melalui peraturan ini emiten didorong untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam tata kelolah perusahaan. Di Indonesia Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk tercapainya pertumbuhan berkelanjutan, yang merupakan hasil dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Pemasalahan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dalam dunia bisnis memerlukan adanya kesepahaman berkaitan dengan keuangan berkelanjutan. Jaeggi *et.al* (2018) dalam penelitiannya bekesimpulan pada akhirnya dunia tidak berada di jalur pembangunan berkelanjutan, meskipun program dan rencana keberlanjutan sudah disepakati dalam organisasi dunia. Setidaknya ada tiga alasan mengapa hal ini harus menjadi perhatian bagi lembaga keuangan: pertama, berpotensi menghadapi risiko yang signifikan kedua, banyak aktivitas yang menjadi tantangan bagi keberlanjutan, ketiga, ada peluang pendapatan yang signifikan. Permasalahan berkaitan investasi keberlanjutan dapat berbeda antara negara maupun wilayah. Sandberg *et.al* (2009) mengemukakan heterogenitas dalam Socially Responsible Investment (SRI) antara lain berkaitan perbedaan budaya dan ideologi antar daerah, perbedaan nilai, norma dan ideologi antara berbagai pemangku kepentingan SRI dan pasar SRI, oleh karena itu adanya kesepahaman semua pihak akan menjadi salah satu faktor penentu pembangunan berkelanjutan.

Kuangan berkelanjutan secara global maupun regional menjadi program penting yang diagendakan dan dijalankan. Negara-negara ASEAN melalui Dewan Taksonomi ASEAN (ATB) merilis Asean Taxonomy for Sustainable Finance (ASEAN Taxonomy). Taksonomi ASEAN mewakili komitmen kolektif Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) dalam transisi menuju kawasan yang berkelanjutan. Namun, kesepakatan Bersama negara ASEAN dalam menjalankan Sustainable Finance tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kesadaran investor dan pelaku bisnis. Respon investor sangat penting untuk mendukung keberhasilan keberlanjutan, keputusan investor berkaitan dengan informasi yang diterima, meningkatkan kepercayaan investor atau sebaliknya terdapat faktor penghambat dalam penerapannya. Dalam beberapa penelitian respon pasar modal terhadap perusahaan yang berorientasi ESG masih sangat rendah, antara lain penelitian Roca (2013), Targanski dan Murhadi (2021). Penelitian berkaitan respon pasar terhadap Sustainable Finance pada masing-masing negara

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran kontradiksi penerapan sustainable finance di wilayah ASEAN khususnya anggota ASEAN Exchange, melalui studi literatur penelitian sebelumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Keuangan Berkelanjutan

Keuangan berkelanjutan (Sustainable Finance) menurut World Bank adalah sebuah proses keputusan investasi sektor keuangan yang mempertimbangkan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Ryszawska (2016) mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dalam gabungan tiga dimensi yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Migliorelli (2021) mendefinisikan sebagai keuangan yang mendukung sektor atau kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian setidaknya satu dari dimensi keberlanjutan yang relevan. Gerster (2011) mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai keuangan yang memperhitungkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Ozili (2021) mendefinisikan sebagai keuangan yang mempertimbangkan pertimbangan ESG ketika mengambil keputusan investasi di sektor keuangan.

Keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang merupakan hasil keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Terdapat 4 dimensi dalam keuangan berkelanjutan, yaitu;

1. Mencapai keunggulan industri, sosial, ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya;
2. Memiliki tujuan terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif
3. Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi
4. Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment).

Keuangan berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan. Arah pengembangan untuk peningkatan daya tahan dan daya saing didasari atas pemikiran bahwasanya sustainable finance merupakan sebuah tantangan dan peluang baru dimana Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memanfaatkan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih stabil. Sedangkan peningkatan pendanaan dalam konteks pasar modal dapat dilakukan dengan membentuk indeks saham berbasis pada lingkungan hidup (Green Index), serta daftar perusahaan go public yang ramah lingkungan hidup (green list). Indeks saham yang ramah lingkungan hidup juga akan menaikkan reputasi atau nama baik dari suatu perusahaan sehingga akan memudahkan dalam memperoleh pendanaan sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pada usahanya. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian berkaitan respon investor pada indeks saham keberlanjutan.

### Corporate Governance

Teori *corporate governance* terkait dengan dua pendapat yang saling bertentangan (Daniri, 2005: 5). Teori pertama, adalah *stewardship theory* yang dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lainnya. *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya, maupun shareholder pada khususnya. Penerapan sustainable finance dapat terlaksana jika tata kelola perusahaan baik dan taat aturan, sehingga tidak akan merugikan pihak terkait.

Teori berikutnya adalah *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, manajemen dipandang sebagai agen bagi para pemegang saham, yang dimungkinkan akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan pemegang saham seperti teori sebelumnya. Dalam pengembangannya *agency theory* mendapat respon lebih luas, karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dari teori ini, sehingga untuk mengurangi masalah keagenan ini pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan yang berlaku,

## Teori Keagenan

Teori keagenan dalam berbagai penelitian membahas bagaimana terjadi konflik kepentingan antara pemilik, manajemen pelanggan dan pihak terkait lainnya. Seiring dengan perkembangan industri global dan dampaknya terhadap lingkungan, kesadaran pentingnya menyelaraskan kepentingan people, planet dan profit menjadi permasalahan dalam dunia bisnis. Permasalahan dapat terjadi jika tidak ada pemahaman yang sama antara pemilik perusahaan, manajemen, dan pemerintah sebagai pembuat regulasi. Penerapan operasional perusahaan yang memperhatikan keberlanjutan dapat menyebabkan penurunan laba akibat biaya yang meningkat, sehingga dividen yang dibagikan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan investor tidak tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang memperhatikan prinsip keberlanjutan seperti ESG. Sehingga investasi pada saham *corporate sustainable* berhadapan dengan asumsi bahwa keberlanjutan bertentangan dengan teori portofolio moderen. Adapun perusahaan yang menerapkan keberlanjutan dalam aktivitasnya membutuhkan biaya yang lebih tinggi sehingga mengurangi *return* bagi pemilik saham (Langbein dan Posner, 1980). Dalam konsep keberlanjutan manajemen tidak hanya bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan (*Shareholder Theory*) namun bekerja untuk kepentingan seluruh pihak terkait (*Stakeholder Theory*).

Penelitian Machain et al (2021) terdapat kesenjangan antara teori dan praktik berkaitan dengan *Sustainable Report*, informasi kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan terkadang tidak lengkap atau menyesatkan. Sehingga selain permasalahan keagenan terkait profit, antara pemilik atau investor dengan manajemen, permasalahan keagenan lainnya yang berkembang di era pembangunan berkelanjutan adalah pelaporan pelaksanaan keberlanjutan yang tidak akurat dan transparan. Hal ini dapat menyebabkan investor tidak percaya dengan laporan keberlanjutan. Adanya asimetri informasi yang dapat menyebabkan respon pasar modal terhadap perusahaan yang menjalankan prinsip keberlanjutan, akan menghambat pencapaian SDGs negara. Jika investor tidak tertarik pada perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan, maka perusahaan menjadi ragu-ragu menerapkan prinsip keberlanjutan, atau mengalami kesulitan pendanaan untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu pemerintah mendorong investasi dan pendanaan untuk tujuan keberlanjutan, hal ini dikenal dengan *Sustainable Finance*

## Penelitian Terdahulu

Penelitian Kumar *et.al* (2022) mengungkapkan dalam hasil penelitian studi literatur, disimpulkan terdapat tujuh tema utama penelitian keuangan berkelanjutan, yaitu investasi yang bertanggung jawab secara sosial, pembiayaan iklim, pembiayaan hijau, investasi berdampak, pembiayaan karbon, pembiayaan energi, dan tata kelola pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Adanya *green washing* pelaporan keberlanjutan perusahaan dalam keuangan berkelanjutan masih kurang diteliti. *Green washing* merupakan tindakan curang yang disengaja dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan. Tindakan ini akan menyebabkan menurunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan yang menjalankan prinsip ESG.

Selain saham terdapat juga obligasi sebagai sumber pendanaan perusahaan. Azhgaliyeva et,al (2020) mengulas penerbitan obligasi hijau dan kebijakan obligasi hijau di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Mengkaji tren penerbitan *green bond* dan penggunaan obligasi hijau yang terdaftar di negara-negara ASEAN per Juni 2019. Kebijakan *green bond* yang diterapkan di Indonesia, Singapura dan Malaysia, sekitar 90% obligasi hijau yang terdaftar di negara-negara ASEAN tercatat di Indonesia (58%), Singapura (18%) dan Malaysia (14%). Namun hasil obligasi hijau dapat digunakan untuk mendanai proyek di luar negeri atau untuk pembiayaan kembali (pembayaran kembali) pinjaman masa lalu, kecuali dibatasi oleh kebijakan tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan Kembali agar obligasi hijau dapat digunakan sesuai dengan tujuan keuangan berkelanjutan.

Durrani dan Rosmin (2020) menggunakan objek penelitian 18 bank sentral dari Asia Pasifik, meneliti pandangan dan kebijakan mengenai keuangan berkelanjutan. Penelitian ini juga meninjau perkembangan terbaru di negara-negara Asia dan Pasifik tertentu mengenai keuangan berkelanjutan untuk menggambarkan tindakan yang telah diambil oleh otoritas moneter dan keuangan untuk mengatasi risiko iklim dan lingkungan, dan untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar percaya bahwa mereka harus menjalankan tugas dalam mempromosikan keuangan berkelanjutan dan opsi pendanaan berkelanjutan, baik melalui amandemen kerangka peraturan, mendorong pinjaman dan produk hijau, atau mempertimbangkan perubahan iklim dalam operasi kebijakan moneter dan keuangan mereka. Sejumlah bank sentral dan otoritas pengawas sudah mempromosikan opsi pembiayaan berkelanjutan secara eksplisit atau implisit. Sementara sebagian tidak percaya, dan belum mengembangkan program pengembangan kapasitas penerapan keuangan berkelanjutan atau pelatihan untuk staf mereka atau komunitas keuangan eksternal.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis literature berkaitan pelaksanaan sustainable finance di negara-negara anggota ASEAN khususnya Negara anggota ASEAN Exchange. ASEAN Exchange adalah pasar modal regional yang terdiri atas 6 negara ASEAN dan 7 bursa efek. Mengumpulkan artikel terkait Sustainable Finance khususnya faktor penghambat penerapan sustainable finance dengan menggunakan *Software Publish or Perish*. Adapun langkah – langkah metode penelitian sebagai berikut:

1. Pencarian artikel menggunakan *Software Publish or Perish* , title words “Indonesia sustainable finance”; “Malaysia sustainable finance” ; “Thailand sustainable finance”; “Singapore sustainable finance”; “Philippines sustainable finance” dan “Vietnam sustainable Finance”
2. Melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan kendala dan permasalahan atau kontradiksi dalam penerapan sustainable finance
3. Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan, pertama tahap reduksi, data dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami. Kedua display, menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2006)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Keuangan berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses pembangunan ekonomi yang diselaraskan dengan pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan. Pencapaian pembangunan berkelanjutan negara dapat dilihat pada nilai dan peringkat *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sandberg *et.al* (2009) mengemukakan perbedaan budaya dan ideologi antar daerah, perbedaan nilai, norma dan ideologi menjadi salah satu faktor penentu pembangunan berkelanjutan. Adapun negara-negara anggota ASEAN Exchange memiliki kemiripan budaya dan kesamaan geografis, namun dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan memiliki skor *Sustainable Development Report* yang berbeda, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel.1 SDGs Negara ASEAN Exchange**

| Negara    | Urutan |      | Skor  |      |
|-----------|--------|------|-------|------|
|           | 2021   | 2019 | 2021  | 2019 |
| Thailand  | 43     | 40   | 74.19 | 73   |
| Vietnam   | 51     | 54   | 72.85 | 71.1 |
| Malaysia  | 65     | 68   | 70.88 | 69.6 |
| Singapura | 76     | 66   | 69.89 | 69.6 |
| Indonesia | 97     | 102  | 66.34 | 64.2 |
| Filipina  | 103    | 97   | 64.51 | 64.9 |

Sumber: [Sustainable Development Report 2022 \(sdgindex.org\)](https://sdgindex.org)

Kesepakatan penerapan pembangunan berkelanjutan dan dukungan pendanaan melalui keuangan berkelanjutan, secara global sudah disepakati dengan kesepakatan “*The Future We Want*” dalam *konfrensi PBB berkaitan Sustainable Development tahun 2012*. Kemudian dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, disepakati sebuah Agenda 2030 yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara regional sebagai bentuk komitmen ASEAN mendukung pengembangan agenda sustainable pada Maret 2021 dibentuklah ASEAN Taxonomy Board (ATB). Kemudian ATB menyusun *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance*, yang merupakan inisiatif bersama yang dihasilkan dengan menyatukan pandangan regulator pasar modal, asuransi dan perbankan negara-negara ASEAN. Hal ini merupakan wujud kesadaran pentingnya dukungan pendanaan pada usaha yang berbasis ESG. Dalam penerapannya *Sustainable Finance* berhadapan dengan berbagai kontradiksi, antara lain prinsip portofolio moderen dan masalah keagenan

antar pihak terkait. Kontradiksi dan permasalahan ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan kreditur dalam menyalurkan dana kepada perusahaan berbasis ESG. Adapun penelitian berkaitan keuangan berkelanjutan di negara anggota ASEAN Exchange berdasarkan pencarian menggunakan Publish or Perish terdapat 29 artikel dengan judul Sustainable Finance pada 6 negara anggota ASEAN Exchange, 19 artikel menggunakan metode kualitatif dan 10 artikel dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian pada 29 artikel membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Adapun analisis konten artikel pada tahap reduksi 29 artikel, diperoleh hasil terdapat 8 hambatan penerapan keuangan berkelanjutan yaitu ; permasalahan inklusi keuangan, permasalahan aturan dan regulasi, kurangnya sosialisasi keuangan berkelanjutan dan kesamaan persepsi antar pihak terkait, pengungkapan laporan berkelanjutan, permasalahan kinerja keuangan, kesulitan menyeimbangkan aspek ekonomi sosial dan lingkungan, permasalahan prosedur pemberian kredit, dan intervensi teknologi. Selain hambatan juga terdapat dampak positif bagi perusahaan antara lain, keuangan berkelanjutan memiliki prinsip yang sama dengan keuangan syariah, sehingga penerapan sustainable finance akan mendorong peningkatan pemanfaatan jasa keuangan syariah. Manfaat lainnya bagi perusahaan, meningkatkan ketahanan perusahaan dimasa depan, meningkatkan pangsa pasar produk dan layanan keuangan hijau, perusahaan mendapatkan akses *green financing* yang lebih murah biaya modalnya, meningkatkan reputasi, serta pengurangan biaya melalui efisiensi.

## Pembahasan

Ancaman perubahan iklim dan efek rumah kaca mendorong adanya agenda global untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak bertanggung jawab. Agenda pembangunan berkelanjutan dapat tercapai jika didukung dengan adanya pendanaan. Keuangan berkelanjutan dapat menjadi solusi pendanaan bagi sektor swasta berbasis ESG untuk mengembangkan operasionalnya. Permasalahan pendanaan dan inklusi keuangan berkelanjutan tidak hanya terjadi pada negara-negara ASEAN namun juga negara Uni Eropa EU-27 (Stwaska dan Jablonska; 2021). Hal ini juga terkait dengan permasalahan aturan dan regulasi yang masih terbatas, regulasi yang komprehensif dapat memfasilitasi dan mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mempromosikan ekosistem berkelanjutan sehingga prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jasa keuangan sebagai penyedia dana. Adapun hal ini dapat disebabkan masih kurangnya sosialisasi dan kesepahaman antara pelaku jasa keuangan terkait prinsip keberlanjutan. Sehingga terdapat perbedaan konsep berkaitan klasifikasi yang dapat dikategorikan sebagai bisnis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian Halimatussadiyah et.al (2018) menemukan adanya perbedaan persepsi banker terkait aktivitas berkelanjutan. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kompetensi petugas perbankan, sangat penting untuk mendukung implementasi keuangan yang berkelanjutan.

Keuangan berkelanjutan sebagai faktor penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan ASEAN dapat dilihat pada Asean Taxonomy for Sustainable Finance. Sektor swasta harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan atau juga disebut *people, profit, planet*. Menurut Suzuki (2021) terdapat kerangka pemikiran epistemik terkait keuntungan sebagai tujuan bisnis, menyebabkan kekuatiran sustainable finance dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu efisiensi melalui pengembangan teknologi diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan, meskipun perusahaan menerapkan prinsip ESG yang selama ini dinilai *High Cost*.

Manfaat jangka panjang penerapan pembangunan berkelanjutan dengan penerapan sustainable finance antara lain meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan daya saing perusahaan dan kemudahan akses pada *green financing*. Selain itu manfaat pelestarian lingkungan dan peningkatan kondisi sosial masyarakat, akan menentukan keberlangsungan perusahaan dimasa depan. Adapun pencapaian pembangunan berkelanjutan di negara ASEAN berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan studi literatur penelitian ini, kesamaan permasalahan yang dihadapi negara ASEAN adalah inklusi keuangan serta aturan dan regulasi dalam pendanaan keuangan berkelanjutan. Adapun kesempatan yang dapat dimanfaatkan adalah keuangan syariah yang memiliki kesamaan prinsip dengan keuangan berkelanjutan, keuangan syariah berkembang di Indonesia dan Malaysia, maka keuangan syariah dapat menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan.

### Kesimpulan

Penelitian ini disimpulkan adanya kesamaan permasalahan yang dihadapi negara-negara anggota ASEAN Exchange berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Antara lain regulasi dan aturan, kemudian dalam penerapannya terdapat perbedaan konsep keuangan berkelanjutan antar pihak berkepentingan. Hal ini selain disebabkan konsep keuangan berkelanjutan yang masih baru namun juga dapat diakibatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang masih kurang. Kebutuhan pendanaan selain dapat diperoleh melalui perbankan juga dapat melalui pasar modal, seperti pasar saham dan obligasi. Namun investor dan kreditur tidak akan bersedia berinvestasi jika tidak terdapat kepastian, misalnya dalam pelaporan berkelanjutan, yang masih terdapat kesenjangan antara laporan dan dampak yang dirasakan dari program-program keberlanjutan perusahaan.

Asean Taxonomy for Sustainable Finance yang disusun oleh Dewan Taksonomi ASEAN merupakan suatu upaya dan kesadaran akan bahaya yang mengancam jika tidak dilakukan perubahan paradigma ekonomi dan bisnis dari orientasi keuntungan menuju pada orientasi keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun makna dari penelitian ini adalah meskipun terjadi kontradiksi antara tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan (*shareholder theory*) dengan tujuan keseimbangan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder Theory*) namun pergeseran paradigma menuju orientasi ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi suatu keharusan guna tercapainya pembangunan berkelanjutan.

### Saran

Perbaiki regulasi dan aturan berkaitan keuangan berkelanjutan terutama adanya sanksi atas ketidakpatuhan dan kesengajaan memanipulasi laporan keberlanjutan sangat dibutuhkan, agar investor dan jasa keuangan bersedia berinvestasi pada perusahaan berbasis ESG. Adapun dukungan pendanaan tidak hanya terbatas pada usaha skala besar namun juga pada usaha kecil yang berbasis ESG. Pergeseran paradigma menuju keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan harus di sosialisasikan sampai pada tingkat masyarakat umum. Sehingga selain pendanaan masyarakat juga memiliki kesadaran untuk menggunakan produk dan jasa berbasis ESG. Dengan demikian perusahaan dapat menjaga keseimbangan *people profit planet*, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan pada negara-negara ASEAN akan semakin meningkat dalam jumlah skor dan peringkat SDGs. Adapun penelitian lanjutan dari hasil penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan bukti empiris terkait 8 hambatan dan manfaat penerapan keuangan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aust, V., Morais, A. I., & Pinto, I. (2020). How does foreign direct investment contribute to Sustainable Development Goals? Evidence from African countries. *Journal of Cleaner Production*, 245, 118823.
- Azhgaliyeva, D., Kapoor, A., & Liu, Y. (2020). Green bonds for financing renewable energy and energy efficiency in South-East Asia: a review of policies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 10(2), 113-140.
- Daniri, M. A. (2005). *Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*. Ray Indonesia.
- Durrani, A., Rosmin, M., & Volz, U. (2020). The role of central banks in scaling up sustainable finance—what do monetary authorities in the Asia-Pacific region think?. *Journal of sustainable finance & investment*, 10(2), 92-112.
- Gerster, R. (2011). Sustainable finance: Achievements, challenges, outlook. *Striking a Balance Ahead of Rio*, 20.
- Jaeggi, O., Webber Ziero, G., Tobin-de la Puente, J., & Kölbel, J. F. (2018). Understanding Sustainable Finance. In *Positive Impact Investing* (pp. 39-63). Springer, Cham.
- Kumar, S., Sharma, D., Rao, S., Lim, W. M., & Mangla, S. K. (2022). Past, present, and future of sustainable finance: insights from big data analytics through machine learning of scholarly research. *Annals of Operations Research*, 1-44.

- ISSN 2303-1174 L.I. Kumajas., D. P. E Saerang., J.B. Maramis., L. O. H. Dotulong., D. Soepomo., Langbein, John H., and Richard A. Posner. "Social investing and the law of trusts." *Mich. L. Rev.* 79 (1980): 72.
- Machain, G., Santhià, C., Ciambotti, G., & Figueroa, M. F. (2021). The Quality of Information of GRI Standards in an Emerging Economy: Evidence from Green Accounting Practices in Argentina. In *Responsible Management in Emerging Markets* (pp. 137-158). Palgrave Macmillan, Cham.
- Migliorelli, M. (2021). What do we mean by sustainable finance? Assessing existing frameworks and policy risks. *Sustainability*, 13(2), 975.
- Nofsinger, J.; Varma, A. Socially responsible funds and market crises. *J. Bank. Financ.* 2014, 48, 180–193
- Ozili, P. K. (2021). Making sustainable finance sustainable. *Financial Internet Quarterly*.
- Roca, E. (2013). The effect on price, liquidity and risk when stocks are added to and deleted from a sustainability index: Evidence from the Asia Pacific context. *Journal of Asian Economics*, 24, 51-65
- Ryszawska, B. (2016). Sustainability transition needs sustainable finance. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, 5(1), 185-194.
- Sandberg, J.; Juravle, C.; Hedesström, T.M.; Hamilton, I. The heterogeneity of socially responsible investment. *J. Bus. Ethics* 2009, 87, 519
- Stawska, J., & Jabłońska, M. (2021). Determinants of Inclusive Growth in the Context of the Theory of Sustainable Finance in the European Union Countries. *Sustainability*, 14(1), 100.
- Suzuki, S. (2021). *Regulating Sustainable Finance in Indonesia: An Interpretive Perspective* (Doctoral dissertation, Monash University).
- Targanski, K. P. T., & Murhadi, W. R. (2021). Sustainable and responsible investment in Indonesia and Malaysia: an event study on SRI-KEHATI and FTSE4GBM Indices. *Jurnal Siasat Bisnis*, 25(1), 69-78.
- Zeidan, R. (2022). Obstacles to sustainable finance and the covid19 crisis. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(2), 525-528.